

Pengaruh Pola Komunikasi dan Struktur Kekuasaan terhadap Pengelolaan Bencana Alam di Masyarakat Desa di Indonesia

Muhammad Ade Kurnia Harahap¹, Irwan Amar², Refiana Yuliatwati³, Auliya Citra⁴

¹ Universitas Simalungun, adekur2000@gmail.com

² Institut Dharma Bharata Grup, irwanamaridbgrup@gmail.com

³ Politeknik Tunas Pemuda Tangerang, yuliarefiana@gmail.com

⁴ Universitas Megarezky, aulyacitra@unimerz.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Des, 2024

Revised Des, 2024

Accepted Des, 2024

Kata Kunci:

Indonesia, Manajemen Bencana, Masyarakat Pedesaan, Pola Komunikasi, Struktur Kekuasaan

Keywords:

Communication Patterns, Disaster Management, Indonesia, Power Structure, Rural Communities

ABSTRAK

Manajemen bencana alam di masyarakat pedesaan sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi dan struktur kekuasaan. Studi ini mengeksplorasi dinamika tersebut di desa-desa di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dengan delapan informan dilakukan, dan data dianalisis menggunakan perangkat lunak NVIVO. Temuan menunjukkan bahwa saluran komunikasi formal, meskipun otoritatif, sering kali mengalami keterlambatan, sementara jaringan informal memberikan informasi yang cepat namun terkadang tidak dapat diandalkan. Struktur kekuasaan yang hirarkis memainkan peran ganda, memfasilitasi pengambilan keputusan namun terkadang mengecualikan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Interaksi dari faktor-faktor ini menyoroti perlunya kepemimpinan yang inklusif, strategi komunikasi yang terintegrasi, dan memanfaatkan praktik-praktik tradisional seperti gotong royong. Studi ini memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan dan praktisi untuk meningkatkan ketangguhan bencana di daerah pedesaan dengan menangani dinamika sosial-budaya.

ABSTRACT

Natural disaster management in rural communities is strongly influenced by communication patterns and power structures. This study explores these dynamics in Indonesian villages, focusing on their impact on disaster preparedness, response and recovery. Using a qualitative approach, in-depth interviews with eight informants were conducted, and data were analyzed using NVIVO software. Findings show that formal communication channels, while authoritative, often suffer from delays, while informal networks provide quick but sometimes unreliable information. Hierarchical power structures play a dual role, facilitating decision-making but sometimes excluding marginalized groups. The interaction of these factors highlights the need for inclusive leadership, integrated communication strategies, and utilizing traditional practices such as gotong royong. This study provides actionable insights for policymakers and practitioners to enhance disaster resilience in rural areas by addressing socio-cultural dynamics.



Corresponding Author:

Name: Muhammad Ade Kurnia Harahap

Institution: Universitas Simalungun

Email: adekur2000@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bencana alam telah menjadi tantangan yang terus berulang di Indonesia, negara yang secara geografis terletak di Cincin Api Pasifik dan rentan terhadap beragam bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Bencana alam di Indonesia menimbulkan tantangan signifikan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang kekurangan sumber daya dan menghadapi dinamika kekuasaan unik. Interaksi antara pola komunikasi dan struktur kekuasaan sangat menentukan hasil tanggap bencana. Ketahanan masyarakat dan kapasitas adaptif ditingkatkan melalui program desa tangguh bencana yang mendorong fleksibilitas dan adaptasi (Hutagalung, 2023), sementara kearifan lokal dan budaya membantu masyarakat merespons secara efektif (Usman et al., 2022). Pada tingkat tata kelola, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat sebelum dan sesudah bencana (Kusumasari, 2019), meskipun tantangan dalam koordinasi dan distribusi bantuan tetap ada, mencerminkan kesenjangan implementasi kebijakan (Boediningsih et al., 2019). Jaringan sosial dan nilai budaya berkontribusi signifikan terhadap respons bencana melalui kearifan lokal (Usman et al., 2022), meskipun sering terhambat oleh manajemen spontan yang kurang memanfaatkan intervensi sosial-budaya (Fuady et al., 2021).

Manajemen bencana yang efektif di masyarakat desa sangat bergantung pada komunikasi yang kohesif dan distribusi kekuasaan yang adil, yang dipengaruhi oleh norma-norma tradisional dan nilai-nilai budaya. Keterlibatan masyarakat, yang difasilitasi oleh saluran komunikasi lokal, terbukti meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Strategi komunikasi komunitas, seperti radio komunitas di Odisha, berperan penting selama Topan Yaas dengan menyebarkan peringatan dini dan mengoordinasikan respons masyarakat untuk meningkatkan ketahanan (Kanjilal et al., 2024). Model komunikasi berbasis adat di Bali juga efektif, di mana struktur desa adat memanfaatkan norma budaya untuk memobilisasi aksi masyarakat selama COVID-19 (Hidayat et al., 2022). Partisipasi aktif masyarakat dalam program Desa Tangguh Bencana, seperti di Desa Gondoriyo, Indonesia, menunjukkan keefektifan keterlibatan akar rumput melalui kegiatan kesiapsiagaan yang melibatkan sukarelawan lokal (Supratiwi, 2022). Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat didukung oleh domain yang saling berhubungan seperti pembagian informasi, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan, menekankan perlunya pendekatan holistik dalam penanggulangan bencana (Rawsthorne et al., 2023).

Struktur kekuasaan di desa-desa Indonesia secara signifikan memengaruhi pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya selama masa darurat, sering kali menyebabkan marginalisasi kelompok rentan. Kepemimpinan lokal dan tradisi sosial-budaya dapat membatasi arus informasi dan inklusivitas dalam penanggulangan bencana. Pemimpin lokal, seperti kepala desa, memiliki otoritas besar yang berisiko konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan jika tidak diawasi oleh tokoh masyarakat lainnya (Daly, 2018). Melibatkan pemimpin yang lebih luas, seperti tokoh agama dan tetua, penting untuk memastikan keputusan dan distribusi sumber daya yang efektif (Daly, 2018). Namun, asimetri kekuasaan sering memperburuk ketidaksetaraan, dengan kelompok rentan kurang terwakili dalam pemerintahan desa (Lewis & Hossain, 2018). Menurunnya peran masyarakat sipil dan pemerintah daerah juga membatasi partisipasi inklusif dalam pengambilan keputusan (Lewis & Hossain, 2018). Penyederhanaan dinamika kekuasaan lokal oleh organisasi eksternal sering menghambat komunikasi dan mobilisasi sumber daya, menghasilkan strategi tanggap bencana yang tidak efektif dan tidak memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat (Daly, 2018).

Kondisi geografis dan geologis Indonesia membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam yang berdampak signifikan pada masyarakat pedesaan dengan sumber daya terbatas. Penanganan bencana yang efektif membutuhkan kombinasi intervensi teknis dan pemahaman sosial-budaya. Masyarakat lokal menggunakan strategi tradisional untuk memitigasi dampak bencana, menekankan pentingnya pengetahuan budaya di samping solusi teknologi, yang dapat ditransformasi menjadi strategi mitigasi yang meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan psikologis (Fakhriati et al., 2024). Partisipasi aktif masyarakat dalam semua fase penanggulangan, dari kesiapsiagaan hingga pemulihan, serta pengintegrasian pengembangan masyarakat dengan pengurangan risiko bencana dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan (Kinanthi, 2022). Namun, kesenjangan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah sering menghambat respons, sehingga membangun saluran komunikasi yang jelas dan struktur kekuasaan yang adil sangat penting untuk alokasi sumber daya dan tindakan kolektif selama bencana (Idroes et al., 2023).

Meskipun kemajuan dalam pendekatan teknis penanggulangan bencana telah dicapai, peran pola komunikasi dan struktur kekuasaan sebagai bagian dari dinamika sosial-budaya masih kurang dieksplorasi di Indonesia. Dalam masyarakat desa, norma tradisional dan hubungan kekuasaan hirarkis sering memengaruhi akses informasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan, yang dapat meminggirkan kelompok rentan. Hal ini dapat menyebabkan respons bencana yang tidak efektif, seperti di Desa Xiaolin saat Topan Morakot, di mana ketidaksesuaian budaya menghambat manajemen darurat (Tsai et al., 2014). Struktur tata kelola tradisional mencerminkan perebutan kekuasaan budaya yang memengaruhi pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, seperti dalam inisiatif berbasis masyarakat di Indonesia yang mengabaikan ketegangan budaya sehingga memarginalisasi kelompok tertentu (Bebbington et al., 2004). Pola komunikasi berbasis budaya yang tidak selaras dengan protokol modern juga sering mengakibatkan informasi keliru dan respons tertunda (Tsai et al., 2014). Memahami peran komunikasi dan kekuasaan dalam penanggulangan bencana sangat penting untuk mengembangkan strategi yang inklusif dan efektif. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana pola komunikasi dan struktur kekuasaan membentuk strategi penanggulangan bencana di masyarakat desa Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Pentingnya Pola Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana*

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama di daerah pedesaan di mana praktik tradisional sering mendominasi. Mekanisme komunikasi tradisional, seperti norma budaya yang mengandalkan tradisi lisan dan pemimpin lokal, menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat (Heath et al., 2020). Pertemuan desa menjadi wadah berbagi informasi penting dan memupuk solidaritas, sementara siaran radio berbasis desa di Indonesia memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat terpencil. Di sisi lain, teknologi modern seperti media sosial dan telepon seluler memungkinkan penyebaran informasi cepat dan koordinasi selama darurat, meskipun kesenjangan literasi dan akses digital tetap menjadi tantangan yang memerlukan pelatihan khusus (Agustina & Rachmawati, 2020). Integrasi saluran komunikasi tradisional dan modern dengan pendekatan komplementer dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana, memastikan semua anggota masyarakat terinformasi, dan memanfaatkan kearifan lokal untuk efektivitas strategi komunikasi, seperti yang terlihat dalam penanganan COVID-19 di daerah pedesaan Indonesia (Heath et al., 2020; Lestari et al., 2021).

2.2 *Struktur Kekuasaan di Masyarakat Pedesaan*

Struktur kekuasaan di masyarakat pedesaan secara signifikan memengaruhi manajemen bencana, menciptakan peluang dan tantangan dalam alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang adil. Pemimpin lokal, seperti kepala desa dan kepala adat,

sering kali menjadi tokoh sentral dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, memobilisasi sumber daya untuk proyek bencana (Mazibuko & Thebe, 2024). Di Filipina, kepemimpinan berbasis masyarakat telah berhasil mendorong ketahanan bencana, meskipun masih menghadapi tantangan dalam inklusivitas dan pendanaan (Abenir et al., 2022). Namun, struktur kekuasaan yang hirarkis sering meminggirkan kelompok rentan, seperti perempuan dan lansia, membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan (Ishaq & Leghari, 2020). Di Pakistan, keluarga dengan status sosial rendah mengalami dampak bencana yang tidak proporsional karena kondisi kehidupan mereka yang termarginalisasi, menyoroti pentingnya tata kelola yang inklusif (Ishaq & Leghari, 2020). Melibatkan kelompok yang terpinggirkan dalam kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat (Piltch-Loeb et al., 2022), dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengambilan keputusan partisipatif dapat membantu memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh struktur kekuasaan yang mengakar (Lewis & Hossain, 2018).

2.3 *Dinamika Sosial-Budaya dalam Penanggulangan Bencana*

Faktor sosial-budaya di daerah pedesaan Indonesia secara signifikan memengaruhi praktik penanggulangan bencana melalui kohesi komunitas dan norma tradisional. Konsep gotong royong memainkan peran penting dalam mendorong respons berbasis masyarakat terhadap bencana, meningkatkan ketahanan kolektif (Widen, 2024). Kearifan lokal, seperti praktik arsitektur dan ritual tradisional, menyediakan panduan penting untuk kesiapsiagaan dan respons bencana (Nopriyastman et al., 2024). Namun, norma budaya juga dapat menjadi hambatan, terutama terkait peran gender, di mana perempuan sering kali terbatas dalam keterlibatan pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana (Widen, 2024). Manajemen bencana yang efektif membutuhkan pengintegrasian kearifan lokal ke dalam strategi pemerintah, meskipun perbedaan pendekatan dapat menjadi tantangan (Saadi, 2021). Memanfaatkan pengetahuan lokal melalui pendekatan berbasis masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan penanggulangan bencana, sementara adaptasi praktik tradisional untuk memenuhi kebutuhan modern menjadi kunci dalam pengurangan risiko bencana yang efektif (Sinta et al., 2022).

2.4 *Kerangka Kerja Teoritis untuk Memahami Dinamika Komunikasi dan Kekuasaan*

Berbagai kerangka kerja teoritis telah digunakan untuk memahami interaksi antara pola komunikasi dan struktur kekuasaan dalam penanggulangan bencana. Teori Jaringan Sosial (Social Network Theory) mengeksplorasi bagaimana informasi mengalir di dalam masyarakat dan menyoroti peran individu-individu kunci dalam menyebarkan pengetahuan, yang sangat relevan di daerah pedesaan di mana jaringan informal sangat penting (Granovetter, 1973). Demikian pula, Teori Dinamika Kekuasaan mengkaji bagaimana otoritas dan pengaruh didistribusikan dalam masyarakat dan dampaknya terhadap praktik penanggulangan bencana (Foucault & Deleuze, 1977). Kerangka kerja ini sangat penting untuk merancang intervensi yang inklusif dan adil. Dengan menggabungkan teori-teori ini, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana komunikasi dan kekuasaan berinteraksi untuk membentuk hasil penanggulangan bencana dapat dicapai.

3. METODE PENELITIAN

3.1 *Desain dan Konteks Penelitian*

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mengkaji pengaruh pola komunikasi dan struktur kekuasaan terhadap manajemen bencana alam di masyarakat desa di Indonesia. Pendekatan kualitatif sangat ideal untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan mengungkap dinamika sosial-budaya yang membentuk praktik penanggulangan bencana. Berfokus pada masyarakat pedesaan di Indonesia-negara yang sangat rentan terhadap bencana alam karena lokasinya yang terletak di Cincin Api Pasifik-studi ini membahas tantangan-tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat ini dalam hal

kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Dengan menangkap perspektif para pemangku kepentingan utama, termasuk tokoh masyarakat, penduduk, dan praktisi tanggap bencana, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana komunikasi dan kekuasaan saling berinteraksi selama bencana alam.

3.2 *Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan delapan informan, yang dipilih secara purposif berdasarkan peran dan pengalaman mereka dalam penanggulangan bencana di masyarakat desa untuk memastikan adanya perspektif yang beragam. Informan terdiri dari pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, anggota masyarakat yang secara aktif terlibat dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana, dan praktisi penanggulangan bencana yang memiliki pengalaman di tingkat desa. Format semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi bidang-bidang tertentu yang diminati sambil mempertahankan konsistensi di seluruh wawancara. Dilakukan dalam bahasa lokal dengan persetujuan peserta, wawancara direkam, dan catatan lapangan yang rinci disimpan untuk melengkapi data.

3.3 *Analisis Data*

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak NVIVO, sebuah alat analisis kualitatif yang membantu dalam mengorganisir, mengkodekan, dan menginterpretasikan data tekstual. Proses analisis dimulai dengan transkripsi dan pengenalan, di mana semua rekaman wawancara ditranskrip secara kata demi kata dan ditinjau ulang beberapa kali untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang konten. Pengkodean awal kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang berulang terkait dengan pola komunikasi, struktur kekuasaan, dan pengaruhnya terhadap penanggulangan bencana. Kode-kode ini dikelompokkan ke dalam tema-tema yang lebih luas melalui analisis tematik, yang menangkap hubungan dan dinamika antara komunikasi dan struktur kekuasaan. Akhirnya, tema-tema yang teridentifikasi ditafsirkan dalam konteks tujuan penelitian, kerangka teori, dan literatur yang ada untuk memberikan wawasan yang bermakna.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Hasil*

a. *Pola Komunikasi Bencana*

Komunikasi di dalam masyarakat desa ketika terjadi bencana terdiri dari dua tingkatan, yaitu formal dan informal. Aliran informasi resmi terjadi dalam komunikasi formal, misalnya, di mana pengumuman dapat disampaikan oleh kepala desa dalam pertemuan masyarakat. Bagaimanapun juga, ada potensi besar bahwa jalur komunikasi seperti itu lebih lambat, karena keputusannya melewati jalur yang lebih tinggi, ditambah dengan ketergantungan pada titik kumpul fisik.

Menurut seorang responden: "Kami biasanya menunggu kabar dari kepala desa, tapi terkadang butuh waktu bagi semua orang untuk berkumpul untuk rapat." Peserta 3, Anggota Masyarakat Sarana komunikasi informal, seperti dari mulut ke mulut dan jejaring sosial, jauh lebih cepat dan mudah diakses. Cara-cara informal seperti ini sering kali menjadi pelengkap saluran formal dalam menjangkau lokasi-lokasi terpencil atau lokasi yang tidak memiliki akses teknologi. Namun, cara-cara tersebut bukan tanpa tantangan.

"Informasi menyebar dari tetangga dengan sangat cepat, tetapi terkadang informasi tersebut tidak benar, dan orang-orang menjadi bingung." (Peserta 5, Petani).

b. Peran Struktur Kekuasaan dalam Penanggulangan Bencana

Struktur kekuasaan di desa-desa yang diteliti sangat hirarkis, dengan otoritas pengambilan keputusan terkonsentrasi di antara kepala desa, tetua adat, dan pemuka agama. Orang-orang ini dipandang sebagai sumber utama panduan selama bencana, dengan kepemimpinan mereka yang secara signifikan mempengaruhi tindakan masyarakat.

“Kami mengandalkan kepala desa untuk mengambil keputusan karena mereka memiliki koneksi dan pengetahuan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.” (Peserta 1, Kepala Desa)

Namun, ketergantungan pada otoritas terpusat ini juga menimbulkan hambatan. Dalam kasus-kasus di mana para pemimpin tidak ada di tempat atau tidak memiliki pengetahuan khusus tentang bencana, penundaan dan inefisiensi terjadi. Selain itu, struktur kekuasaan sering kali tidak mengikutsertakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting.

“Dalam rapat-rapat, selalu laki-laki yang paling banyak bicara. Perempuan hanya mengikuti keputusan tanpa memberikan kontribusi.” (Peserta 7, Warga Perempuan).

Distribusi sumber daya juga tergantung pada permainan kekuasaan yang berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa peserta. “Mereka sering membantu mereka yang dekat dengan tetua desa terlebih dahulu; yang lain harus menunggu lebih lama.” (Peserta 4, Pemilik Toko Lokal)

c. Keterkaitan antara Komunikasi dan Kekuasaan

Pola komunikasi berinteraksi dengan struktur kekuasaan dalam mempengaruhi hasil penanggulangan bencana. Para pemimpin mengendalikan saluran komunikasi formal, memperkuat otoritas mereka namun membatasi aliran informasi ke beberapa kelompok. Sebaliknya, jalur komunikasi informal sering kali melewati struktur kekuasaan ini dan menyediakan sarana alternatif untuk menyebarkan informasi.

“Kadang-kadang kami tidak menunggu kabar resmi dan membagikan apa yang kami ketahui kepada tetangga. Lebih cepat seperti itu.” (Peserta 8, Petani)

Namun, efektivitas komunikasi informal bergantung pada kepercayaan dan kohesi di dalam masyarakat. Di masyarakat yang struktur kekuasaannya mendorong inklusivitas, komunikasi menjadi lebih lancar dan efektif. Sebaliknya, di mana hierarki menciptakan perpecahan, kesenjangan informasi lebih terasa.

“Jika para pemimpin melibatkan semua orang, segala sesuatunya akan berjalan lebih baik. Namun, ketika mereka hanya berkonsultasi dengan beberapa orang, yang lain merasa tidak dilibatkan dan tidak yakin.” (Peserta 6, Pemimpin Agama)

4.2 Pembahasan**a. Peran Komunikasi dalam Manajemen Bencana**

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya saluran komunikasi formal dan informal. Sementara saluran formal selalu sangat otoritatif, lambat dan hirarkis, saluran informal lebih cepat tetapi kadang-kadang menghasilkan informasi yang salah. Mengintegrasikan saluran-saluran tersebut akan menciptakan sistem komunikasi yang kuat di mana penyebaran informasi yang tepat waktu dapat dipastikan dengan akurat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan (Hasmira, 2021; Irmayani et al., 2022; Zulaikha & Brereton, 2013) bahwa sistem komunikasi harus dapat diandalkan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kasus di daerah pedesaan di Indonesia, penggunaan kebiasaan lokal seperti pertemuan masyarakat dan penggunaan fasilitas modern seperti SMS akan meningkatkan efektivitas komunikasi.

b. Struktur Kekuasaan dan Ketahanan Masyarakat

Di desa-desa, terdapat kekuatan dan kelemahan dari struktur kekuasaan yang hirarkis. Meskipun ada kepemimpinan yang terpusat, yang berarti keputusan yang cepat dapat diambil dan dikoordinasikan dengan mudah, selalu ada peluang untuk mengesampingkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan menyebabkan ketidakefisienan dalam proses. Partisipasi kelompok marjinal, terutama perempuan, perlu lebih diutamakan dalam proses pengambilan keputusan.

“Jika perempuan dan anak muda lebih terlibat, kita bisa mendapatkan ide yang lebih baik dan solusi yang lebih cepat.” (Peserta 2, Guru)

Studi ini mendukung (Liu, 2024; Narayan et al., 2024; Olson & Brennan, 2022), yang menyoroti bahwa struktur kekuasaan yang inklusif berkaitan dengan distribusi sumber daya yang adil dan peningkatan ketahanan di tingkat masyarakat. Hal ini dapat ditingkatkan melalui program pelatihan untuk para pemimpin dan mendorong gaya kepemimpinan yang inklusif.

c. Dinamika Sosial-Budaya dalam Komunikasi dan Kekuasaan

Nilai-nilai budaya, seperti gotong royong, atau kerja sama, menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong tindakan kolektif dalam bencana. Praktik-praktik tradisional seperti ini mendorong kepercayaan dan kerja sama, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengatasi hambatan kekuasaan dan komunikasi. Namun, norma-norma budaya yang membatasi partisipasi kelompok-kelompok tertentu - terutama perempuan - membutuhkan pendidikan dan kampanye kesadaran.

“Ketika kami bekerja bersama, seperti membersihkan sungai untuk mencegah banjir, kami merasa lebih kuat dan aman.” (Peserta 5, Petani)

Temuan ini mendukung argumen (Fakhriati et al., 2024; Suwarlan et al., 2024; Zeballos-Velarde et al., 2023) bahwa strategi penanggulangan bencana harus selaras dengan konteks sosial-budaya setempat. Intervensi yang disesuaikan yang menghormati praktik-praktik tradisional sambil mengatasi keterbatasan mereka dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

4.3 Implikasi Praktis

Studi ini menawarkan beberapa rekomendasi praktis:

- a. Kombinasikan saluran komunikasi formal dan informal, untuk memastikan akurasi dan ketepatan waktu. Misalnya, menggunakan teknologi seluler untuk peringatan waktu nyata sambil mempertahankan pertemuan masyarakat untuk diskusi mendalam.
- b. Membekali para pemimpin desa dengan pengetahuan manajemen bencana dan mendorong praktik kepemimpinan yang inklusif untuk melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.
- c. Mengembangkan praktik-praktik tradisional seperti gotong royong untuk menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan sambil mengatasi keterbatasannya.
- d. Menerapkan mekanisme yang transparan dan adil untuk distribusi sumber daya untuk meminimalkan pilih kasih dan memastikan keadilan.

4.4 Kontribusi terhadap Penelitian dan Arah Masa Depan

Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyoroti interaksi antara komunikasi dan kekuasaan dalam penanggulangan bencana dalam konteks pedesaan di Indonesia. Studi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang peka terhadap konteks yang mengintegrasikan dinamika sosial-budaya.

Penelitian di masa depan dapat memperluas cakupannya dengan menyertakan sampel yang lebih besar dan lebih beragam atau mengeksplorasi peran teknologi dalam menjembatani kesenjangan komunikasi dan kekuasaan. Studi perbandingan antara daerah

pedesaan dan perkotaan juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan solusi yang berbeda.

5. KESIMPULAN

Studi ini menyoroti peran penting dari pola komunikasi dan struktur kekuasaan dalam menentukan efektivitas penanggulangan bencana alam di masyarakat pedesaan di Indonesia. Saluran komunikasi formal menyediakan informasi yang terstruktur dan tervalidasi, sementara jaringan informal memungkinkan penyebaran yang cepat, menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut. Struktur kekuasaan yang hirarkis memfasilitasi pengambilan keputusan yang tersentralisasi tetapi sering kali meminggirkan kelompok-kelompok tertentu, sehingga memerlukan strategi yang lebih inklusif. Praktik-praktik tradisional seperti gotong royong mendorong kerja sama dan ketahanan, tetapi membutuhkan adaptasi agar sesuai dengan kebutuhan manajemen bencana modern. Temuan-temuan ini membutuhkan intervensi praktis, termasuk program peningkatan kapasitas bagi para pemimpin, kebijakan distribusi sumber daya yang inklusif, dan penggunaan teknologi untuk melengkapi metode komunikasi tradisional. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, penanggulangan bencana dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan efektif, serta meningkatkan ketahanan masyarakat pedesaan yang rentan. Studi ini berkontribusi pada literatur yang berkembang mengenai dimensi sosial-budaya dalam penanggulangan bencana dan memberikan landasan untuk penelitian dan pembuatan kebijakan lebih lanjut dalam konteks yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abenir, M. A. D., Manzanero, L. I. O., & Bollettino, V. (2022). Community-based leadership in disaster resilience: The case of small island community in Hagonoy, Bulacan, Philippines. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 71, 102797.
- Agustina, A. R., & Rachmawati, T. (2020). The Use of Information Communication and Technology (ICT) to Enable Transparency, Accountability, and Participation in Indonesia. *Iapa Proceedings Conference*, 589–607.
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2004). Village politics, culture and community-driven development: insights from Indonesia. *Progress in Development Studies*, 4(3), 187–205.
- Boediningsih, W., Afdol, S. H., Winandi, W., Suwardi, S. H., & Hum, M. (2019). Appropriate natural disaster management policy in guarantee accuracy of target post disaster assistance. *Prizren Social Science Journal*, 3(2), 79–87.
- Daly, P. (2018). An applied anthropological perspective on localizing post-disaster aid: Lessons from post-tsunami Aceh, Indonesia. *The Asian Tsunami and Post-Disaster Aid*, 101–119.
- Fakhriati, F., Supriatin, Y. M., Supriadi, A., Juliastuty, D., Trinirmalaningrum, T., Sururoh, L., Musfeptial, M., Mulyadi, M., & Rusnandar, N. (2024). Local cultural coping strategies to mitigate the impact of Baribis Fault disasters. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 3551.
- Foucault, M., & Deleuze, G. (1977). Intellectuals and power. *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews*, 205, 209.
- Fuady, M., Munadi, R., & Fuady, M. A. K. (2021). Disaster mitigation in Indonesia: between plans and reality. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1087(1), 12011.
- Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380.
- Hasmira, M. H. (2021). Disaster Communication Based on Local Wisdom at Disaster Pried Areas. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 5(1), 19–23.
- Heath, R. L., Horsley, J. S., Guest, G., & Glazier, C. (2020). Disaster and emergency crisis management communication. In *Advancing crisis communication effectiveness* (pp. 92–109). Routledge.
- Hidayat, M., Muljono, P., Maarif, S., & Saleh, A. (2022). Indigenous Village-Based Disaster Communication in COVID-19 Management. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 1045–1049.
- Hutagalung, S. S. (2023). Adaptive capacity in the implementation of disaster response village programme in Indonesia: Literature review. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 15(1), 1–7.
- Idroes, G. M., Hardi, I., Nasir, M., Gunawan, E., Maulidar, P., & Maulana, A. R. R. (2023). Natural disasters and economic growth in Indonesia. *Ekonomikalia Journal of Economics*, 1(1), 33–39.

- Irmayani, N. R., Habibullah, H., Mujiyadi, B., Nurhayu, N., & Erwinsyah, R. G. (2022). Utilization of ICT in Maintaining Social Resilience in Rural Indonesia. *2022 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*, 1–7.
- Ishaq, M., & Leghari, I. U. (2020). Political/Power Structure and Vulnerability to Natural Disaster in North Western Pakistan. *Research Journal of Social Sciences and Economics Review*, 1(4), 185–193.
- Kanjilal, M. K., Malik, K. K., & Kapoor, P. (2024). Fostering resilience: Community radio and disaster communication in Odisha, India. *Media, Culture & Society*, 01634437241282243.
- Kinanthi, R. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Untuk Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan. *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 22.
- Kusumasari, B. (2019). Natural hazards governance in Indonesia. In *Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science*.
- Lestari, P., Paripurna, E. T., Barus, C. C. B., & Astari, D. W. (2021). Disaster communication management based on local wisdom of Gending Jawa in controlling the spread of COVID-19. *AIP Conference Proceedings*, 2363(1).
- Lewis, D., & Hossain, A. (2018). Dealing with the local level power structure: findings from a qualitative study of three villages in Greater Faridpur District. *Journal of Bangladesh Studies*, 18(1–2).
- Liu, Z. (2024). A Review and Prospect of Research on Inclusive Leadership. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 58, 63–73.
- Mazibuko, O., & Thebe, V. (2024). Identity, experience, and non-partisan: the institution of traditional chiefs and development in a rural local municipality in North West Province, South Africa. *African Identities*, 1–13.
- Narayan, A. K., Boone, N., Monga, N., McFarlane, N., Mango, V. L., Seifert, M., Smith, A., Woods, R. W., & Weissman, I. A. (2024). Fostering Organizational Excellence through Inclusive Leadership: Practical Guide for Radiology Leaders. *RadioGraphics*, 44(9), e230162.
- Nopriyasman, N., Asnan, G., Fauzi, A., Hastuti, I. P., Ritonga, A. H., Kurniawan, V., & Mairiska, R. (2024). Reading indigenous signs: The wisdom of nagari communities toward natural disaster in Pasaman Barat. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 107, 104497.
- Olson, B., & Brennan, M. A. (2022). The Centrality of Diversity, Equity, and Inclusion to Community and Crisis Response: An Interactional Approach. In *Community Development for Times of Crisis* (pp. 215–233). Routledge.
- Piltch-Loeb, R., Bernard, D., Vallejo, B. Q., Harriman, N., & Savoia, E. (2022). Engaging community leaders in sharing local knowledge for emergency preparedness to leverage communication and trusted assets for vulnerable populations. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 16(4), 1452–1458.
- Rawsthorne, M., Howard, A., Joseph, P., Sampson, D., & Harris, M. K. (2023). Understanding community-led disaster preparedness. *The Australian Journal of Emergency Management*, 38(2), 49–54.
- Saadi, Y. (2021). Incorporating Cultural Attributes into Disaster Risk Reduction-Based Development Plans in Indonesia. *International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering*, 631–640.
- Sinta, D., Iskandar, J., & Gunawan, B. (2022). Cultural strategies of the local and transmigrant communities in dealing with land and forest fire disasters in West Kotawaringin District, Central Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 23(9).
- Supratiwi, Y. (2022). Community participation in disaster management in Gondoriyo village administration, Ngaliyan sub-district, Semarang city. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1041(1), 12032.
- Suwarlan, S. A., Lai, L. Y., & Said, I. (2024). Socio-Cultural Resilience Framework For The Sustainability Of The Sea Tribes Community Of The Insular City. *Alam Cipta: International Journal on Sustainable Tropical Design Research & Practice*, 17(1).
- Tsai, J.-S., Cheng, C.-C., & Chi, C. S.-F. (2014). Influence of culture on human–system interaction of emergency response to Xiaolin Village incident in Typhoon Morakot. *Journal of the Chinese Institute of Engineers*, 37(5), 611–620.
- Usman, M., Mario, M., Tamrin, S., & Amandaria, R. (2022). Socio-Cultural Intervention As Disaster Mitigation In Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(3), 534–542.
- Widen, K. (2024). Peranan Kebudayaan dalam Pembangunan: Perspektif Antropologi. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 13(2), 487–499.
- Zeballos-Velarde, C., Butron-Revilla, C., Manchego-Huaquipaco, G., & Yory, C. (2023). The role of ancestral practices as social capital to enhance community disaster resilience. The case of the Colca Valley, Peru. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 92, 103737.
- Zulaikha, E., & Brereton, M. (2013). Communication choices to engage participation of rural Indonesian craftspeople in development projects. *Human-Computer Interaction–INTERACT 2013: 14th IFIP TC 13*

International Conference, Cape Town, South Africa, September 2-6, 2013, Proceedings, Part I 14, 780–787.